

**PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN  
KEBIJAKAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA PADA  
PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN BALEENDAH  
KABUPATEN BANDUNG**

**Husaeri Priatna**

[herieckall@gmail.com](mailto:herieckall@gmail.com)

**Muhammad Iqbal**

[balliq85@gmail.com](mailto:balliq85@gmail.com)

**Agustinus Kasipmabin**

[kasipmabinagus@gmail.com](mailto:kasipmabinagus@gmail.com)

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, yaitu untuk mengetahui pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, dan sampel yang diambil sebanyak 8 orang dari masing-masing Pemerintahan Desa dan Kelurahan sehingga jumlah sampel sebanyak 64 responden.

Berdasarkan hasil pengujian bahwa secara simultan dan parsial Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kebijakan Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa. Adapun hasil Koefisien Determinasi sebesar 56,4% dan sisanya sebesar 43,4% merupakan variabel lain yang turut mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Desa tetapi tidak diteliti.

**Kata kunci :** Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kesejahteraan Masyarakat Desa

**I. Pendahuluan**

**1.1 Latar Belakang Masalah**

Kesejahteraan masyarakat selain didukung oleh produktivitas masyarakat itu sendiri harus pula didukung oleh pemerintah setempat. Pemerintah desa dan kelurahan dalam hal ini harus memperhatikan kehidupan ekonomi masyarakat yang dialokasikan dari dana desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pembedayaan masyarakat desa, maka kegiatan-

**Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana  
Desa dan Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan  
Masyarakat Desa|Husaeri Priatna, Muhammad Iqbal,  
dan Agustinus Kasipmabin**

kegiatan yang dibiayai dana desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan. Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga, dan meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di desa.

Pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Maka kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai desa harus dipastikan mengikutsertakan seluruh masyarakat desa dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan rencana dalam proses perencanaan dan masyarakat.

Namun berdasarkan kutipan penulis dari [databoks.katadata.co.id](http://databoks.katadata.co.id), ketika Republik Indonesia berusia 77 tahun pada 17 Agustus 2022. banyak orang merasa masyarakat Indonesia belum maju dan sejahtera. Menurut hasil survei Litbang Kompas, dari 504 orang yang disurvei, mayoritas atau 70,4% menilai kondisi rakyat yang maju dan sejahtera belum tercapai pada usia ke-77 Indonesia. Responden yang menilai kemajuan dan kesejahteraan sudah tercapai hanya 27,3%, sedangkan 2,3% responden sisanya menjawab tidak tahu. "Keresahan masyarakat perlu direspons dengan itikad pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan rakyat. Terlebih lagi, jumlah responden yang merasakan situasi tidak ideal ini lebih banyak dibandingkan dua tahun lalu," ujar peneliti Litbang Kompas Arita Nugraheni, seperti dilansir Kompas.id, Senin (15/8/2022). Survei ini dilakukan melalui telepon pada 9-11 Agustus 2022. Jumlah responden 504 orang dengan kriteria usia minimal 17 tahun yang tersebar di 34 provinsi Indonesia. Sampel ditentukan secara acak dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% dan nirpencuplikan penelitian kurang lebih 4,37%.

Berdasarkan kenyataan di atas, bahwa masih belum meratanya kesejahteraan masyarakat yang semestinya menjadi tugas pemerintah desa dan kelurahan. Maka dari itu penulis bermaksud melakukan penelitian pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, apakah Alokasi Dana Desa (ADD) sudah tepat dalam memberikan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat, yang didukung oleh kebijakan desa dan kelurahan itu sendiri. Kebijakan pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, yang melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa. Karena pada dasarnya setiap program desa yang dijalankan harus dipertanggungjawabkan. Sebagaimana menurut Webster dalam Waluyo (2007:190) mendefinisikan bahwa akuntabilitas sebagai suatu keadaan yang dapat dipertanggung jawabkan, bertanggung jawab, dan akuntabel. Arti dari akuntabel itu sendiri adalah: Pertama, dapat dipertanggungjawabkan, dapat menjawab pada atasan sebagaimana manusia bertanggung jawab kepada tuhan-Nya atas apa yang telah ia lakukan. Kedua, memiliki kemampuan untuk dipertanggungjawabkan secara eksplisit, dan yang ketiga, sesuatu yang bisa diperhitungkan atau dipertanggungjawabkan.

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dipertanggungjawabkan. Karena menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal (1) ayat 1 menyatakan bahwa "Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan kondisi warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kebutuhan material merupakan kebutuhan materi seperti: sandang, pangan, papan dan kebutuhan lain bersifat primer, sekunder, tersier”. Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.140/640/SJ, tanggal 22 Maret 2007 menyatakan bahwa “Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa memberikan formulasi sebagai acuan bagi daerah dalam menghitung alokasi dana desa. Rumus yang dipergunakan berdasarkan asas merata dan adil”.

Selanjutnya adalah kebijakan desa, dimana kebijakan pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, yang melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa. Batasan tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye dalam Ayuningtyas (2014: 8) yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*)”. Seorang ahli Jerman lainnya, Crinson dalam Ayuningtyas menyatakan kebijakan merupakan sebuah konsep, bukan fenomena spesifik maupun konkret, sehingga pendefinisian akan menghadapi banyak kendala atau dengan kata lain tidak mudah. Selanjutnya Crinson juga membenarkan bahwa kebijakan akan jauh lebih bermanfaat apabila dilihat sebagai petunjuk untuk bertindak atau serangkaian keputusan atau keputusan yang saling berhubungan satu sama lain. Menurut Fredrich dalam Agustino (2017:16-17) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Sementara itu, Anderson dalam Agustino mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Berdasarkan hasil observasi serta pra-survey di lapangan bahwa Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah dalam upayanya untuk mensejahterakan masyarakat desa selalu dihadapkan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) serta bagaimana kebijakan yang harus diambil. Dengan demikian penulis berasumsi bahwa kinerja pemerintah yang baik akan didukung oleh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa serta Kebijakan Desa yang baik.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
2. Bagaimana pengaruh Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
3. Bagaimana pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

**Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana  
Desa dan Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan  
Masyarakat Desa|Husaeri Priatna, Muhammad Iqbal,  
dan Agustinus Kasipmabin**

## **II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

### **2.1 Kajian Pustaka**

#### **2.1.1 Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Menurut Subroto dalam Lestari (2017:20) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting dalam menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah dalam pertanggungjawaban.

Adapun arti pengelolaan menurut Terry (2013:168) mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi, maupun organisasi. Manajer yang baik selalu bekerja dengan langkah-langkah manajemen yang fungsional, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol.

Definisi Alokasi Dana Desa (ADD) itu sendiri merupakan manifestasi kabupaten dalam memenuhi hak-hak dasar desa dalam memberikan pelayanan publik. Alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Sanusi & Djumlani (2019:141-149) bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang harus diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa, yang berasal dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional sedangkan 70% untuk belanja publik serta pemberdayaan masyarakat.

#### **2.1.2 Pengertian Kebijakan Desa**

Kebijakan desa merupakan kebijakan publik. Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Menurut Syaukani, Afan Gafar dan Rasyid (2009:238) menjelaskan bahwa kebijakan publik yang dibentuk oleh pemerintah itu mencakup bidang apa saja?. Jawabannya adalah karena kegiatan pemerintahan itu mencakup seluruh aspek kehidupan warga masyarakat dan para penyelenggara negara, maka kebijakan publik yang dibentuk mencakup segala aspek kehidupan warga masyarakat baik yang bersifat memberikan pelayanan, melakukan pengaturan, mendistribusikan apa yang menjadi harta benda dan kekayaan negara, mencari sumber daya yang diperlukan untuk menggerakkan kegiatan negara, mencari sumber daya alam untuk memobilisasi dana untuk negara, mempersiapkan individu dalam rangka mengisi posisi dalam pemerintahan guna melaksanakan semua kegiatan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, dan lain sebagainya.

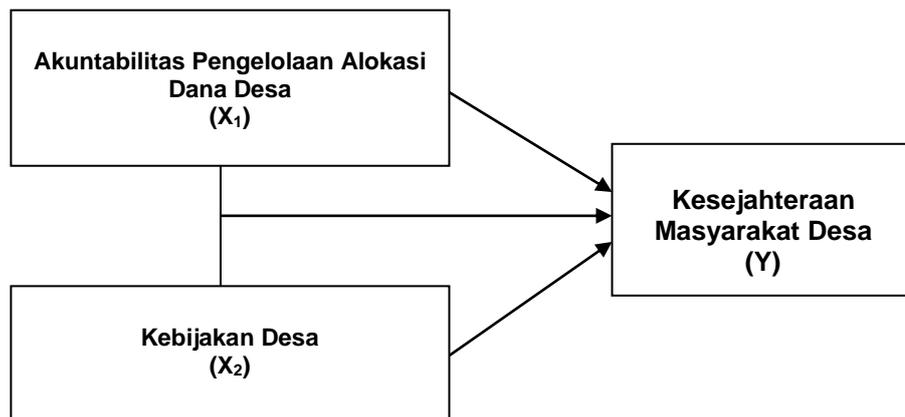
### 2.1.3 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat Desa

Menurut Fahrudin (2012:96-97) menyatakan bahwa kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tentram, baik lahir maupun batin”.

Kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat, tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentasnya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktifitas masyarakat.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa dapat digambarkan skema paradigma penelitian sebagai berikut :



**Gambar 1**  
**Bagan Paradigma Penelitian**

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan diatas dan berdasarkan kerangka pemikiran yang ada, maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa secara parsial berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
2. Kebijakan Desa secara parsial berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
3. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kebijakan Desa secara simultan berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.

**Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana  
Desa dan Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan  
Masyarakat Desa|Husaeri Priatna, Muhammad Iqbal,  
dan Agustinus Kasipmabin**

### **III. Objek dan Metode Penelitian**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Adapun objek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kesejahteraan Masyarakat Desa (Y)
2. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( $X_1$ )
3. Kebijakan Desa ( $X_2$ )

#### **3.2 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini mengungkapkan keadaan masalah yang terjadi pada saat penelitian ini berlangsung dan data yang digunakan menekankan pada data-data *numeric* (angka).

##### **3.2.1 Populasi dan Sampel**

###### **3.2.1.1 Populasi**

Menurut Sugiyono (2017:80) mendefinisikan populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan pengertian di atas, populasi merupakan obyek atau subyek yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian maka yang menjadi populasi sasaran dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung yang berjumlah 8 (delapan) desa dan kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Andir
2. Kelurahan Baleendah
3. Desa Bojongmalaka
4. Desa Jelekong
5. Desa Malakasari
6. Desa Manggahang
7. Desa Rancamanyar
8. Desa Wargamekar

###### **3.2.1.2 Sampel**

Menurut Sugiyono (2017:62) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).

Teknik penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah didasarkan pada metode *non probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan peneliti dalam hal ini dengan menggunakan pendekatan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2017:85) bahwa *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan purposive sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan. Oleh karena itu, sampel yang dipilih sengaja ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh penulis untuk mendapatkan sampel yang representatif.

Adapun kriteria yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu aparatur pemerintah dari jumlah 8 desa dan kelurahan antara lain : 8 orang Kepala Desa/Lurah sebagai pengambil kebijakan, 8 orang Sekretaris Desa/Kelurahan dan 32 orang Kepala Urusan/Kasi yang mengetahui dan terlibat langsung dengan keuangan, dan Ketua RW dan RT sebagai perwakilan dari masyarakat masing-masing berjumlah 1 orang, jadi jumlahnya sebanyak 2 orang. Secara jelasnya sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Sampel Penelitian (Responden)**

No	Nama Desa / Kelurahan	Kepala Desa / Lurah	Sekretaris Desa / Kelurahan	Kaur / Kasi	Ketua RW dan RT	Jumlah
1	Kelurahan Andir	1	1	4	2	8
2	Kelurahan Baleendah	1	1	4	2	8
3	Desa Bojongmalaka	1	1	4	2	8
4	Desa Jelekong	1	1	4	2	8
5	Desa Malakasari	1	1	4	2	8
6	Desa Manggahang	1	1	4	2	8
7	Desa Rancamanyar	1	1	4	2	8
8	Desa Wargamekar	1	1	4	2	8
	<b>Total Sampel</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>64</b>

Sumber : Hasil Observasi / Pra survey (2023)

Berdasarkan data diatas, maka sampel dalam penelitian ini yang dipilih sebanyak 64 orang responden yang tersebar di desa dan kelurahan di Wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Data diatas sesuai yang tertera pada struktur organisasi desa dan kelurahan, kecuali para staf desa yang tidak termasuk dalam kategori responden.

### 3.2.2 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

#### 1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) dengan variabel dependen (Y), apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan Seperti yang telah dikemukakan oleh Sugiyono (2017:275) bahwa : "Analisis regresi ganda digunakan bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana

**Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana  
Desa dan Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan  
Masyarakat Desa|Husaeri Priatna, Muhammad Iqbal,  
dan Agustinus Kasipmabin**

keadaan (naik/turunnya) variabel independen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor *predictor* dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2”.

**2. Analisis Koefisien Korelasi**

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan sebab akibat yang terjadi antara Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kebijakan Desa dengan Kesejahteraan Masyarakat Desa.

Adapun untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan, dilihat pedoman tabel kriteria koefisien korelasi sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Koefisien Korelasi Dan Taksirannya**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2017:231)

**3. Koefisien Determinasi**

Setelah koefisien korelasi diketahui, maka selanjutnya adalah menghitung koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut:

$$KD = R^2 \cdot 100\%$$

Sumber : Sutrisno Hadi (2004:39)

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

$R^2$  = Koefisien Korelasi Dikuadratkan

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

- a. Jika KD mendekati nol (0), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat lemah.
- b. Jika KD mendekati satu (1), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat kuat.

**4. Pengujian Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2015:64) mendefinisikan bahwa : “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka  $H_0$  tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan  $H_a$  menunjukkan adanya dampak antara variabel bebas dan variabel terikat. Hipotesis yang dirumuskan dapat diuji melalui pengujian hipotesis berikut ini:

**a. Uji t (Parsial)**

Uji t statistik digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa secara individu. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ .

Setelah menghitung nilai  $t_{hitung}$  selanjutnya membuat kesimpulan mengenai diterima atau tidaknya hipotesis setelah dibandingkan antara  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  dengan ketentuan uji sebagai berikut:

1. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima (berpengaruh).
2. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak (tidak berpengaruh).
3. Apabila menggunakan program komputer (*software SPSS*), jika nilai sig  $< \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak.

**b. Uji F (Simultan)**

Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji model/uji anova, yaitu uji untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya.

Kriteria pengujian dengan membandingkan  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$  yaitu:

1. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima (berpengaruh).
2. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak (tidak berpengaruh)
3. Apabila menggunakan program komputer (*software SPSS*), jika nilai sig  $< \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak.

**c. Menentukan Taraf Signifikansi**

Hasil analisis dan pengujian hipotesis tingkat signifikannya adalah 0,05% ( $\alpha = 0,05$ ) artinya jika hipotesis nol ditolak atau diterima dengan taraf kepercayaan 95%, maka kemungkinan bahwa hasil penarikan dari kesimpulan mempunyai kebenaran 95% dan hal ini menunjukkan adanya pengaruh atau tidak adanya pengaruh yang meyakini (signifikan) antara dua variabel tersebut.

**IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**4.1 Hasil Penelitian**

**4.1.1 Analisis Regresi Linear Berganda**

**Tabel 3**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7.923	4.508		1.757	.084
1 X1	.769	.153	.523	5.022	.000
X2	.366	.121	.314	3.020	.004

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Pengolahan data dengan IBM SPSS Statistic 20

**Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana  
Desa dan Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan  
Masyarakat Desa|Husaeri Priatna, Muhammad Iqbal,  
dan Agustinus Kasipmabin**

Berdasarkan hasil perhitungan secara manual maupun SPSS diatas, jadi didapat persamaan sebagai berikut :

$$Y = 7,923 + 0,769X_1 + 0,366X_2$$

Persamaan regresi linier berganda yang diperoleh tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Konstanta dengan nilai 7,923 menunjukkan bahwa apabila tidak terdapat variabel independen ( $X_1$  dan  $X_2 = 0$ ), maka Kesejahteraan Masyarakat Desa adalah sebesar 7,923.
- b.  $b_1$  sebesar 0,769 hasilnya positif, ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan Kesejahteraan Masyarakat Desa sebesar 0,769 dengan asumsi variabel lain tetap (konstan).
- c.  $b_2$  sebesar 0,366 hasilnya positif, ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Kebijakan Desa sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan Kesejahteraan Masyarakat Desa sebesar 0,366 dengan asumsi variabel lain tetap (konstan).

#### 4.1.2 Analisis Koefisien Korelasi

**Tabel 4**  
**Hasil Analisis Korelasi Pearson**  
**Correlations**

		X1	X2	Y
X1	Pearson Correlation	1	.583	.706
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	64	64	64
X2	Pearson Correlation	.583**	1	.619**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	64	64	64
Y	Pearson Correlation	.706**	.619**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	64	64	64

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Pengolahan data dengan IBM SPSS Statistic 20

**Tabel 5**  
**Hasil Analisis Korelasi Ganda**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.751 <sup>a</sup>	.564	.549	5.942580

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : Pengolahan data dengan IBM SPSS Statistic 20

Dilihat dari dua tabel perhitungan korelasi diatas, menunjukkan bahwa :

- a. Korelasi antara Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan Kesejahteraan Masyarakat Desa adalah sebesar 0,706. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,60-0,799 mempunyai hubungan yang kuat. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa akan diikuti oleh kenaikan Kesejahteraan Masyarakat Desa.
- b. Korelasi antara Kebijakan Desa dengan Kesejahteraan Masyarakat Desa adalah sebesar 0,619. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,60-0,799 mempunyai hubungan yang kuat. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Kebijakan Desa akan diikuti oleh kenaikan Kesejahteraan Masyarakat Desa.
- c. Korelasi ganda antara Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kebijakan Desa secara simultan dengan Kesejahteraan Masyarakat Desa adalah sebesar 0,751. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,70 – 0,799 mempunyai hubungan yang kuat. Karena nilainya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kebijakan Desa secara bersama-sama, maka akan diikuti oleh kenaikan Kesejahteraan Masyarakat Desa.

#### **4.1.3 Analisis Koefisien Determinasi**

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5, bahwa secara simultan dengan melihat besarnya koefisien determinasi (*R square*) yang diperoleh adalah sebesar 0,564 yang menunjukkan bahwa 56,4% Kesejahteraan Masyarakat Desa dapat dijelaskan oleh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kebijakan Desa sedangkan sisanya sebesar 43,6% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

#### **4.1.4 Uji t ( Parsial) dan Uji F ( Simultan)**

##### **1. Uji t ( Parsial)**

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian, maka dilakukan pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima.
  - Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak.
- a. Pada tabel 3 diatas nilai  $t_{hitung}$  untuk Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( $X_1$ ) adalah sebesar 5,022, pada  $t_{tabel}$  dengan dk 61 ( $n-3 = 64-3$ ) dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 1,999. Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5,022 > 1,999$ ) serta nilai sig. lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( $X_1$ ) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa ( $Y$ ).
  - b. Pada tabel 3 diatas nilai  $t_{hitung}$  untuk Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( $X_1$ ) adalah sebesar 3,020, pada  $t_{tabel}$  dengan dk 61 ( $n-3 = 64-3$ ) dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 1,999. Karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,020 > 1,999$ ) serta nilai sig. lebih kecil dari 0,05 ( $0,004 < 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Kebijakan Desa ( $X_2$ ) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa ( $Y$ ).

**Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana  
Desa dan Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan  
Masyarakat Desa|Husaeri Priatna, Muhammad Iqbal,  
dan Agustinus Kasipmabin**

**2. Uji F (Simultan)**

**Tabel 6  
Hasil Perhitungan Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2784.199	2	1392.099	39.420	.000 <sup>b</sup>
	Residual	2154.170	61	35.314		
	Total	4938.369	63			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X<sub>2</sub>, X<sub>1</sub>

Sumber : Pengolahan data dengan IBM SPSS Statistic 20

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian, maka dilakukan pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima.
- Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai  $F_{hitung}$  adalah sebesar 39,420 sedangkan  $F_{tabel}$  dapat diperoleh dengan tabel F derajat bebas yaitu residual 61 dan regresi 2 dengan taraf signifikan 0,05, sehingga diperoleh  $F_{tabel}$  sebesar 3,150. Karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $39,420 > 3,150$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Kemudian nilai signifikansi uji-F sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%). Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( $X_1$ ) dan Kebijakan Desa ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa (Y).

**4.2 Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat, maka pembahasan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**1. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa secara Parsial terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Pada Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah**

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kesejahteraan Masyarakat Desa memiliki hubungan yang positif serta mempunyai hubungan yang kuat. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa akan diikuti oleh kenaikan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Adapun pengaruh secara parsial Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa pada Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Aditya Achmad Fathony, Muhammad Iqbal dan Asep Sopian (2019) bahwa Alokasi Dana Desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa seperti halnya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

tentang Kesejahteraan Sosial Pasal (1) ayat 1 menyatakan bahwa “Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan kondisi warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kebutuhan material merupakan kebutuhan materi seperti: sandang, pangan, papan dan kebutuhan lain bersifat primer, sekunder, tersier”. Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.140/640/SJ, tanggal 22 Maret 2007 menyatakan bahwa “Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa memberikan formulasi sebagai acuan bagi daerah dalam menghitung alokasi dana desa. Rumus yang dipergunakan berdasarkan asas merata dan adil”.

## **2. Pengaruh Kebijakan Desa secara Parsial terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Pada Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah**

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, bahwa Kebijakan Desa dan Kesejahteraan Masyarakat Desa memiliki hubungan yang positif serta mempunyai hubungan yang kuat. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Kebijakan Desa akan diikuti oleh kenaikan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Adapun pengaruh secara parsial Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa pada Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Sri Andayani (2022) di Desa Cibiru Hilir, berdasarkan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa secara parsial akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa dan kebijakan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, secara simultan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa sebagaimana Syauckani, Afan Gafar dan Rasyid (2009:238) menjelaskan bahwa kebijakan publik yang dibentuk oleh pemerintah itu mencakup bidang apa saja ?. Jawabannya adalah karena kegiatan pemerintahan itu mencakup seluruh aspek kehidupan warga masyarakat dan para penyelenggara negara, maka kebijakan publik yang dibentuk mencakup segala aspek kehidupan warga masyarakat baik yang bersifat memberikan pelayanan, melakukan pengaturan, mendistribusikan apa yang menjadi harta benda dan kekayaan negara, mencari sumber daya yang diperlukan untuk menggerakkan kegiatan negara, mencari sumber daya alam untuk memobilisasi dana untuk negara, mempersiapkan individu dalam rangka mengisi posisi dalam pemerintahan guna melaksanakan semua kegiatan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, dan lain sebagainya.

## **2. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kebijakan Desa secara Simultan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Pada Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah**

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, bahwa variabel Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kebijakan Desa secara simultan memiliki hubungan yang kuat dan positif dengan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kebijakan Desa secara bersama-sama, maka akan diikuti oleh kenaikan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Kemudian hasil penghitungan Koefisien Determinasi (KD) menunjukkan hasil sebesar 56,4% memiliki pengaruh yang cukup tinggi/cukup kuat, adapun sisanya ditunjukkan dengan nilai epsilon ( $\epsilon$ ) sebesar 43,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti Kepemimpinan Transformasional, Anggaran Daerah, Pengendalian

**Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana  
Desa dan Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan  
Masyarakat Desa|Husaeri Priatna, Muhammad Iqbal,  
dan Agustinus Kasipmabin**

Keuangan, Motivasi Kerja, Kompetensi dan lain sebagainya. Selanjutnya hasil uji-F menunjukkan bahwa secara simultan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kebijakan Desa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa pada Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah.

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kebijakan Desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa, peneliti dapat memahami bahwa secara bersama-sama apabila Alokasi Dana Desa dikelola dengan baik serta efektif dan tepat sasaran, disertai pula kebijakan desa yang tepat guna akan menentukan masyarakat desa yang sejahtera, apalagi berdasarkan hasil analisis menunjukkan adanya hubungan serta pengaruh yang positif dan signifikan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kebijakan Desa secara simultan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa pada Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah. Hal ini peneliti sampai ke pemahaman bahwa secara realita kedua variabel ini masing-masing memiliki pengaruh yang signifikan, apalagi keduanya secara bersama-sama apabila dikelola dengan baik maka akan meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa.

## **V. Simpulan dan Saran**

### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah. Dengan demikian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa memberikan kontribusi positif yang dapat menentukan Kesejahteraan Masyarakat Desa pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah, artinya semakin baik Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa maka akan semakin baik Kesejahteraan Masyarakat Desa demikian pula sebaliknya.
2. Kebijakan Desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah. Dengan demikian Kebijakan Desa memberikan kontribusi positif dalam menentukan Kesejahteraan Masyarakat Desa pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah, artinya semakin baik Kebijakan Desa maka akan semakin baik Kesejahteraan Masyarakat Desa demikian pula sebaliknya.
3. Secara simultan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kebijakan Desa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah, artinya apabila secara bersama-sama Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kebijakan Desa semakin baik, maka akan semakin baik pula Kesejahteraan Masyarakat Desa, demikian juga sebaliknya. Hasil pengaruh secara simultan ini cukup kuat/tinggi yaitu sebesar 56,4%, adapun sisanya sebesar 43,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti Kepemimpinan Transformasional, Anggaran Daerah, Pengendalian Keuangan, Motivasi Kerja, Kompetensi dan lain sebagainya.

## **5.2 Saran**

Saran yang dapat dijadikan masukan dari penulis adalah sebagai berikut:

### **A. Bagi Instansi Pemerintah**

1. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa, dengan demikian saran penulis, agar Kepala Desa / Lurah beserta aparatnya harus selalu menjaga agar Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa tetap efektif, efisien dan tepat sasaran. Semakin baik Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa maka akan mempengaruhi secara signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah.
2. Kebijakan Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa, dengan demikian agar seluruh Aparat Desa / Kelurahan mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah supaya setiap kebijakan yang diambil bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, karena semakin baik kebijakan desa maka akan semakin baik juga kesejahteraan masyarakat desa pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah, apalagi memiliki pengaruh yang signifikan.
3. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kebijakan Desa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah. Dengan demikian penulis menyarankan agar seluruh elemen Pemerintahan Desa / Kelurahan memperhatikan kedua faktor penentu Kesejahteraan Masyarakat Desa ini tetap baik dan optimal karena akan menentukan secara signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Baleendah.

### **B. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Saran yang dapat penulis kemukakan bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Apabila menggunakan variabel yang sama agar ditambah satu variabel independen atau menggunakan variabel intervening serta tidak sebatas *outputs* yaitu kesejahteraan masyarakat desa, bisa juga ditambahkan variabel *outcomes* misalnya dampaknya atau implikasinya terhadap kepatuhan pembayaran pajak.
2. Memperluas lokus penelitian seperti Pemerintah Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Bandung, atau jika terlalu banyak bisa juga meneliti setiap kecamatan.

## **DAFTAR PUSTAKA :**

- Agustino, Leo. 2017. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.. Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 8.
- Fahrudin. 2012. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Lestari, Sri. 2017. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono). Skripsi Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negerin Surakarta.
- Sanusi, & Djumlani. 2019. "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa di Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju".e journal katalogis , 141-149

**Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana  
Desa dan Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan  
Masyarakat Desa|Husaeri Priatna, Muhammad Iqbal,  
dan Agustinus Kasipmabin**

Syaukani, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid. 2009. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Terry, George R. 2013. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Waluyo. 2007. Perpajakan Indonesia, Buku 1 Edisi 7. Jakarta : Salemba Empat.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/17/77-tahun-ri-merdeka-banyak-warga-merasa-belum-sejahtera>.

<http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/172/4/BAB%20II.pdf>.

<https://eprints.uny.ac.id/8530/3/BAB%202%20-%2007401241045.pdf>.

<https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/182>.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009>.

<http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/172/4/BAB%20II.pdf>.

<http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/1564>.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009>.